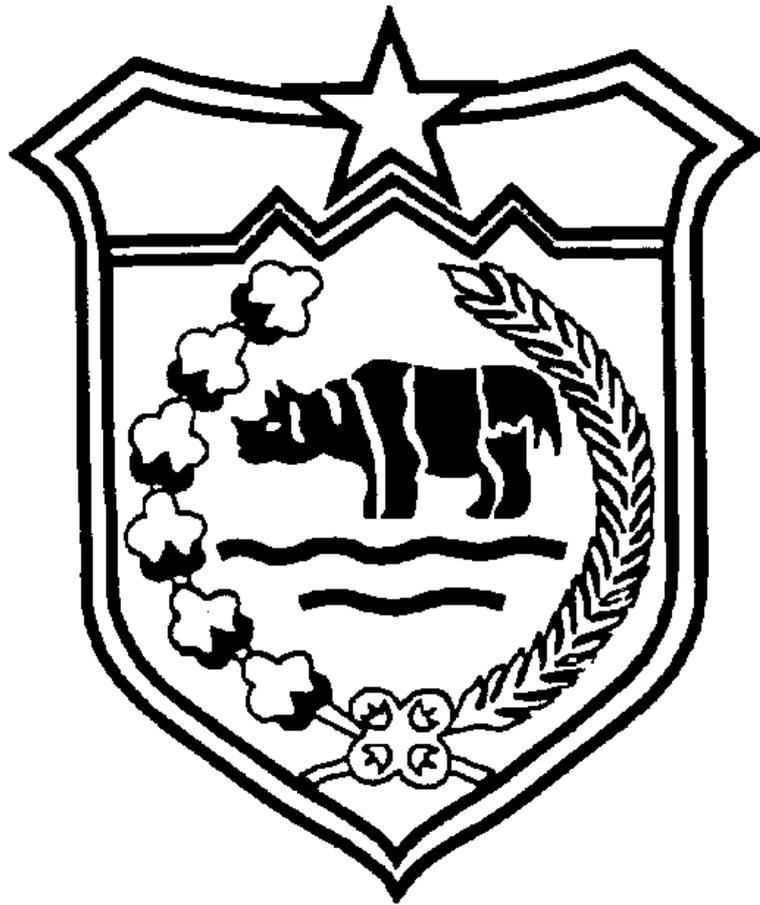


# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **AKHIR**

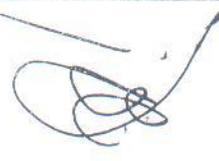
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET  
KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**TAHUN 2013**

Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor  
**BIDANG EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	CATATAN HASIL ASISTENSI dan VERIFIKASI	PARAF AWAL	PARAF AKHIR	KETERANGAN
1	Kabid Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda Yamin Bunyamin, S.Sos., M.Si NIP. 19680314 199403 1 005	3 Ketua Tim	4 Perbaiki format di arisan Tim • Tolong & kanya sekalian di PRIND	5 	6 	7
2	Kasubid Pengembangan Usaha dan Penanaman Modal Bappeda Abdul Aziz, S.IP NIP. 19810501 200604 3 008	Sekretaris	4 • Setorannya Segera dan Format. • Program sudah selesai dgn PRIND • SB bupati dibuat • Kelengkapan berkas logat dibuat • sudah benar ke COORDINATOR dan PKT k Rend.			
3	Kasubid Pengembangan SDA dan Buatan Bappeda Dian Permadi, S. Hut NIP. 19730827 200003 1 003	Anggota	4 She			



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

Jl. A. Satriawijaya No. 2 Telp./fax. (0253) 201003 Pandeglang 42213

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG

**Nomor : 050/Kep.66-DPKPA/2013**

#### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014**

#### **KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset tentang Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
  2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
  3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/kep.197-Huk/2013 Tahun 2013 tanggal 04 Juni 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
  4. Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.91-DPKPA/2011 tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
- KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
  - BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
  - BAB IV : PENUTUP
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 18 Juni 2013

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan  
Pendapatan dan Aset  
Kabupaten Pandeglang



**H. PARDIJO SUKARTO, SE, MM.**

NIP. 19530609 198211 1 001

## KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 pada hakekatnya merupakan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.

Rencana kerja ini merupakan salah satu dokumen pegangan bagi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset guna mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2014 antara lain dihadapkan pada tantangan strategis sebagai berikut : (1) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel: (2) pengelolaan aset yang auditabel: serta (3) peningkatan pendapatan asli daerah.

Mengingat besarnya tantangan tugas tersebut maka rencana kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang keuangan, pendapatan dan aset yang lebih responsive dan adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam Rencana Kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada dan kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

Tidak ada gading yang tak retak, kami akan mempertimbangkan dengan baik semua masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan dokumen rencana kerja selanjutnya. Besar harapan kami agar rencana kerja ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKPA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKPA .....	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	25
3.3. Program dan Kegiatan .....	26
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

1	Tabel 1	Jumlah Kegiatan pada Renja DPKPA Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Sasaran dan Program .....	7
2	Tabel 2	Identifikasi Kebijakan Nasional .....	24
3	Tabel 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2015 .....	31

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), didalamnya diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dikenal dengan moto BEBENAH (Bersih, Benar dan Amanah) yang dicanangkan sejak terpilihnya kepala daerah yang baru pada Tahun 2011.

Rancangan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang ini disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- A. Persiapan Penyusunan RENJA DPKPA
- B. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPKPA

- C. Penyusunan Rancangan RENJA DPKPA
- D. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD
- E. Perumusan Rancangan Akhir RENJA SKPD

Pada tahap persiapan penyusunan RENJA DPKPA Kabupaten Pandeglang meliputi pembentukan tim penyusun Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Selanjutnya pada tahap penyusunan rancangan awal Renja DPKPA Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: Pengolahan data dan informasi, Analisis terhadap capaian kinerja DPKPA, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKPA tahun lalu yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan DPKPA Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah, telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Penyusunan dokumen rancangan Renja SKPD.

Kemudian pada tahap Penyusunan Rancangan RENJA DPKPA, dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal Renja SKPD yang telah disusun sebelumnya dan dibahas dalam dalam forum SKPD atau forum gabungan SKPD, Dokumen rancangan Renja SKPD yang telah disusun selanjutnya dikirimkan kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya dilaksanakan tahap pembahasan rancangan Renja DPKPA pada Forum SKPD dengan melibatkan para pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV guna mempertajam isi yang akan disajikan.

Terakhir dilaksanakan tahap Perumusan Rancangan Akhir RENJA DPKPA Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 setelah mendapat masukan dan koreksi hasil pembahasan rancangan Renja DPKPA.

Penetapan Rancangan Akhir Renja oleh Kepala DPKPA dilaksanakan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 ditetapkan.

## **1.2.Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40 /KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007 –2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008, Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 Revisi atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010;
17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
18. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
19. Keputusan Bupati Pandeglang No. 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang.

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah guna memenuhi kewajiban DPKPA sebagai SKPD dalam menyediakan dokumen perencanaan tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Renja-SKPD.

Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai tolak ukur kinerja masing – masing program dan kegiatan guna memudahkan penilaian capaian kinerja pelaksanaannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2014.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Bab ini berisi uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

#### **LAMPIRAN**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKPA**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPA Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 mencakup rencana dan pencapaian kinerja setiap kegiatan melalui capaian indikator sasaran yang dipilah berdasarkan program.

Berdasarkan rencana kerja Tahun 2012, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran, 9 (sembilan) Program dan 87 (delapan puluh tujuh) Kegiatan. Secara rinci dari ketujuh indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.  
Jumlah Kegiatan pada Renja DPKPA Tahun 2012  
Berdasarkan Sasaran dan Program

No.	Sasaran	Program	Jumlah Kegiatan
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	15
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7
3	Terselenggaranya aparatur yang berdisiplin dalam berpakaian	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1
4	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1
5	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3
6	Tersusun dan tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	3
7	Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	29
8	Terselenggaranya Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang	Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah	14

9	Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	14
<b>JUMLAH KEGIATAN</b>			<b>87</b>

Tingkat capaian kegiatan untuk setiap indikator sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan secara umum telah tercapai dengan sangat baik. Rata-rata pencapaian sasaran yang diperoleh oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang tahun 2012 adalah sebesar 95,30 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 15 (lima belas) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	87,30	87,30

Dari 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/ keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan, adapun kegiatan yang tingkat realisasi tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dimana tingkat penyerapan anggarannya hanya mencapai 0%. Kegiatan lainnya yang tidak memenuhi hasil/ target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor yang hanya sebesar 69,23% saja, Penyediaan Makanan dan Minuman yang hanya sebesar 66,61%. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada kegiatan tersebut;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative	%	100	82,68	82,68

Dari 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/ keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan, adapun kegiatan yang tingkat realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- (2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor;

Anggaran pada ketiga kegiatan tersebut hingga akhir tahun anggaran 2012 tidak dapat diserap maksimal, serta Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Listrik tidak dapat diserap sama sekali. Tidak terserapnya anggaran kegiatan tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya belanja yang dikeluarkan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Namun demikian, hal ini tetap akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada program secara keseluruhan;

### 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 1 (satu) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terselenggaranya aparatur yang berdisiplin dalam berpakaian	%	80	80,73	80,73

Capaian hasil/ keluaran dari kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu pada program ini sangat memuaskan. Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pakaian Batik dan Pakaian Olahraga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 1 (satu) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan	%	80	16,22	16,22

Capaian hasil/ keluaran dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada program ini tidak dapat diserap maksimal hal ini tetap akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada program secara keseluruhan;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	%	80	32,53	32,53

Capaian hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya berbagai dokumen pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset seperti : Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan TP-TGR, Laporan Rekonsiliasi Keuangan, dan Laporan Keberadaan Aset daerah yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset. Namun pada program ini

tidak dapat diserap maksimal hal ini tetap akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada program secara keseluruhan

6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Tersusun dan tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD	%	80	95,87	95,87

Capaian hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset seperti : DPA, DPA Pergeseran, DPPA, Renja, IKU, TAPKIN, Rencana Kinerja, Laporan Tahunan SKPD, Lakip, CALK, LRA, Laporan Capaian Kinerja per Kegiatan, Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulanan, LPPD serta penyusunan Neraca Dinas Pengelolaan Keuangan.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Bidang Perbendaharaan melalui 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	84,40	84,40

Dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/ keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan, adapun kegiatan yang tingkat realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Asistensi Penyusunan SPT/restitusi PPh '21;
- (3) Fasilitasi Kegiatan TAPD dan Sekretariat TAPD;

Anggaran pada ketiga kegiatan tersebut hingga akhir tahun anggaran 2012 tidak dapat diserap secara maksimal serta kegiatan Asistensi Penyusunan SPT/restitusi PPh '21 tidak dapat diserap sama sekali. Namun demikian, hal ini tetap akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada program secara keseluruhan;

#### 8. Program Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah

Program Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset melalui 14 (empat belas) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terselenggaranya Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	92,39	92,39

Capaian hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Adapun kegiatan yang tingkat capaian kinerja keluarannya belum optimal yaitu pada kegiatan Penatausahaan Belanja Modal SKPD.

#### 9. Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan melalui 14 (empat belas) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Rencana	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terselenggaranya Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang	%	100	86,26	86,26

Capaian hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Adapun kegiatan yang tingkat capaian kinerja keluarannya belum optimal yaitu pada Kegiatan Verifikasi dan Rekonsiliasi Piutang Pajak, Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Pendaerahan PBB P2 (pedesaan dan perkotaan), serta Kegiatan Penyusunan Perubahan Perda Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Tahun 2012 tersebut di atas, dalam upaya peningkatan capaian target kinerja hasil/ keluaran dari setiap kegiatan, perlu kiranya diambil langkah-langkah perbaikan pada sisi perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Terutama pada saat merencanakan / menentukan besaran target keluaran suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang tersedia.

Sedangkan capaian Renstra SKPD dari Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Tahun 2012 dapat terlihat dari beberapa output yang ada, yaitu:

- Dokumen Perda Perubahan APBD TA 2012
- Dokumen Perda APBD TA 2013
- Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD TA 2013
- Dokumen Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD TA 2013
- Dokumen hasil Penyampaian APBD pasca evaluasi
- Dokumen Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2012
- Dokumen Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD TA 2013

- Dokumen hasil Penyampaian APBD Perubahan TA 2012 pasca evaluasi Gubernur
- Dokumen Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012
- Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2013
- Dokumen Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dokumen Perbup Pelaksanaan APBD TA 2012
- Dokumen NHPD TA 2012
- Terlaksananya Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Terlaksananya Sosialisasi Hibah dan Bansos Kab. Pandeglang TA 2012
- Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB) TA 2013
- Dokumen Standar Satuan Harga Belanja (SSHB) TA 2013
- Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan SOP TP-TGR
- Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan SOP Pengelolaan dan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Pandeglang
- Dokumen Raperda tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang
- SOP dan Penyusutan Nilai Barang Milik Daerah
- Terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
- Terlaksananya Sosialisasi Perda Pajak Daerah
- Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi Daerah
- Terbitnya SP2D
- Tersusunnya Surat Penyediaan Dana (SPD)

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset sebagai SKPD juga memiliki fungsi pelayanan. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh DPKPA Kabupaten Pandeglang baik kepada masyarakat maupun kepada setiap SKPD, yaitu :

1. Penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi wajib pajak baru;

2. Layanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah, seperti : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
3. Layanan Penerimaan TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi);
4. Layanan Pengajuan Gaji PNS;
5. Layanan pengajuan pencairan dana kegiatan dari setiap SKPD;
6. Layanan rekonsiliasi Laporan Realisasi Keuangan bulanan dari setiap SKPD; serta
7. Layanan inventarisasi dan pengelolaan Aset Daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang dibawah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sebesar Rp. 17.723.929.800,- dapat terealisasi sebesar Rp. 22.667.050.440,- atau sebesar 127,89%.

Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain dapat terlaksana secara maksimal walaupun dengan keterbatasan yang ada seperti kualitas dan jumlah pegawai yang ada.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKPA**

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2013, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, ada beberapa hal mendasar yang menjadi isu permasalahan mendesak untuk segera ditangani. Secara garis besar, isu-isu permasalahan yang muncul tersebut antara lain :

- 1) Belum optimalnya penetapan prakiraan pendapatan daerah dalam rangka penetapan PAGU Anggaran Tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan seringnya nilai PAGU untuk setiap SKPD berubah-ubah;
- 2) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah belum tersosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya;
- 3) Belum adanya penerapan *Reward* dan *Punishment* terhadap wajib pajak;

- 4) Anggaran yang dikelola Bidang Pendapatan belum dapat mendongkrak hasil pendapatan asli daerah secara optimal;
- 5) Telah dibentuknya UPT tersendiri yang menangani Pendapatan Daerah/ Pendapatan Asli Daerah dari PBB dan BPHTB;
- 6) Penetapan anggaran kas untuk SKPD di luar DPKPA belum memperhatikan urgensi waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencairan anggaran cenderung dilaksanakan pada akhir tahun;
- 7) Penerbitan penetapan PAGU Indikatif tahun rencana belum sesuai dengan jadwal waktu proses perencanaan;
- 8) Belum optimalnya pengelolaan dan penataan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya pengelolaan kekayaan daerah.

#### **2.4. Review Rancangan Renja Akhir SKPD**

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 2014 Kabupaten Pandeglang ini, mengalami beberapa kali perubahan usulan kegiatan yang diajukan oleh para pejabat struktural pada lingkup DPKPA Kabupaten Pandeglang, baik dari sisi perubahan jumlah anggaran yang diajukan maupun terhadap jumlah kegiatannya.

Pada rancangan awal Renja SKPD Tahun 2014 yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, DPKPA Kabupaten Pandeglang mengusulkan sebanyak 8 (delapan) program, 61 (enam puluh satu) Kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp. 14.562.233.444,-, sedangkan plafon pagu indikatif dari Bappeda sebesar Rp. 7.713.021.500,-.

Kemudian pada rancangan Renja Akhir Tahun 2014 yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, DPKPA Kabupaten Pandeglang kembali mengusulkan sebanyak 7 (tujuh) program, 62 (enam puluh dua) kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp. 12.891.593.444,- sedangkan plafon pagu indikatif dari Bappeda sebesar Rp. 11.213.021.500,-.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Stakeholder**

Berdasarkan hasil pertemuan dalam forum Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 5-14 Maret 2013, diperoleh beberapa usulan kebutuhan yang dapat dipertimbangkan kedalam program dan kegiatan DPKPA Kabupaten Pandeglang.

Adapun usulan Program dan Kegiatan dari unsur stakeholder yang disarankan untuk dilaksanakan pada Tahun 2014 mendatang, adalah berasal dari MUI Kelurahan Babakan Kalanganyar berupa Kendaraan Roda Empat (1 unit), Kendaraan Roda Dua (1 unit) dan Laptop (1 unit).

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil. Cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 2010-2014 untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita luhurnya yaitu:

- (i) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat,
- (ii) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan
- (iii) Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat. *Pertama*, capaian laju pertumbuhan ekonomi masih rendah. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang. *Kedua*, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang

mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (*inclusive growth*). Memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Sehingga program-program afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan continue dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat.

**Ketiga**, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. **Keempat**, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. **Kelima**, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. **Keenam**, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. **Ketujuh**, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. **Kedelapan**, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. **Kesembilan**, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. **Kesepuluh**, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Memperhatikan kesepuluh tantangan pembangunan lima tahun mendatang di atas, berbagai program yang menjadi skala prioritas utama yang akan dilakukan adalah ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

Memperhatikan dan mencermati uraian di atas, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN  
BERKEADILAN”***

Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah **Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2010-2014** adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender.

Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim

investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Terkait dengan 11 Prioritas Nasional diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Kementerian Keuangan mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Ketahanan Pangan; dan (3) Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

Untuk mendukung Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pada Substansi Inti Otonomi Daerah tentang Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Perimbangan Daerah, Kementerian Keuangan melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah (1) Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah dan (2) Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah. Selain itu, pada Substansi Inti Regulasi tentang Percepatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundangan di Tingkat Pusat maupun Daerah hingga Tercapai Keselarasan Arah Dalam Implementasi Pembangunan, diantaranya Penyelesaian Kajian 12.000 Peraturan Daerah selambat-lambatnya 2011, Kementerian Keuangan melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah (1) Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan; dan (2) Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan pada Substansi Inti Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi tentang Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara

tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan yaitu: *Pertama*, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) dengan Indikator Kinerja Keegiatannya adalah Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu. *Kedua*, Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) dengan Indikator Kinerja Keegiatannya adalah (1) Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien; dan (2) Penyediaan Anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program dibidang pangan, pertanian, dan industri pedesaan sesuai dengan persetujuan.

Kementerian Keuangan mendukung Prioritas Nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha pada 3 (tiga) Substansi Inti yaitu: (1) Logistik Nasional, (2) Sistem informasi dan (3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). *Pertama*, pada Substansi Inti Logistik Nasional tentang Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi, Kementerian Keuangan melaksanakan Kegiatan Prioritas Nasional Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Bidang Kepabeanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu (1) Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk; (2) Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan; (3) Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB); dan Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (*Customs Advance Trade System*). *Kedua*, pada Substansi Inti Sistem Informasi tentang Beroperasinya secara penuh *National Single Window* (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor, Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Keuangan yaitu Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan Indikator Kinerja Keegiatannya adalah Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC. *Ketiga*, pada Substansi Inti Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) tentang Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema *Public-Private Partnership* sebelum 2012, Kementerian Keuangan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan Prioritas Nasional yaitu (1) Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai; dan (2) Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas tersebut yaitu Persentase penyelesaian usulan pembuatan/revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat/direvisi.

Selama Lima tahun kedepan, dalam rangka melaksanakan prioritas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas yang kokoh serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, Kementerian Keuangan mendukung 3 (tiga) prioritas bidang ekonomi yaitu: (1) Prioritas Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah; (2) Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan; dan (3) Stabilitas Sektor Keuangan.

Prioritas Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah, terdiri dari 4 (empat) fokus prioritas yaitu:

1. Optimalisasi anggaran belanja pemerintah pusat.
2. Pengelolaan perimbangan keuangan.
3. Pengelolaan perbendaharaan negara.
4. Pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara.

Prioritas Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan, terdiri dari 2 (dua) fokus prioritas yaitu:

1. Perumusan kebijakan fiskal, pengelolaan pembiayaan anggaran dan pengendalian resiko.
2. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara.

Prioritas Stabilitas Sektor Keuangan, dengan Fokus Prioritas Peningkatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Keuangan yang mempunyai sasaran yaitu: (1) Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memgang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan integritas; dan (2) Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global.

Tabel 2.  
Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Ket
1	Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera	RPJMN 2010 - 2014	
2	Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan	RPJMN 2010 - 2014	
3	Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang	RPJMN 2010 - 2014	
4	optimalisasi pendapatan Negara	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
5	perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka peningkatan pendapatan	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
6	Mendukung langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong <i>pro growth, pro job, dan pro poor (triple track strategy)</i>	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
7	Mendukung kebijakan reformasi birokrasi, termasuk penyempurnaan sistem remunerasi, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan perbaikan kesejahteraan aparatur Negara	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
8	Efisiensi belanja negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara Pemerintah dan pemerintah daerah	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
9	Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja Negara	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
10	Optimalisasi pengelolaan kas	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	
11	Pengamanan kekayaan negara yang meliputi administratif, hukum, dan fisik, sehingga keberadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi nasional atas tanah dan bangunan milik Negara	Renstra KemenKeu 2010 - 2014	

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui pemahaman tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan potensi yang ada di daerah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan;
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah dan perbendaharaan daerah yang professional dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan tugas seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
4. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan daerah sebagai acuan dalam berbagai keperluan.

Berdasarkan tujuan di atas, beberapa hal yang menjadi sasarannya adalah:

1. Terlaksananya koordinasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Terlaksananya peningkatan capaian pendapatan daerah yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBD atau APBD-P melalui penyediaan perundang-undangan daerah guna peningkatan kepatuhan wajib pajak;
3. Terlaksananya peningkatan tata kelola pelaksanaan belanja daerah yang tertib, transparan dan akuntabel melalui upaya optimalisasi alokasi belanja daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien;
4. Terlaksananya optimalisasi pengelolaan kas daerah dalam hal perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan *idle* kas, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup sehingga penyaluran belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan;

5. Terlaksananya penatausahaan kekayaan daerah yang handal dan akuntabel melalui pencatatan seluruh kekayaan daerah dalam daftar barang, baik yang terdapat pada SKPD sebagai pengguna maupun pada DPKPA sebagai pengelola.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdeasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang menetapkan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

#### **3.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Tujuan pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran adalah guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset bidang administrasi perkantoran.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Terlaksananya perjalanan dinas serta tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu;
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor;
- Tersedianya kelengkapan administrasi kepegawaian dan kearsipan;
- Terlaksananya layanan administrasi perkantoran
- Terlaksananya pembayaran honorarium TKK Kab. Pandeglang.

#### **3.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Tujuan pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang sistem pelayanan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Terpeliharannya gedung kantor;
- Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional;
- Terpeliharannya perlengkapan gedung kantor;

- Tersedianya gedung kantor yang representatif;
- Terpeliharanya jaringan LAN.

3.3.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah guna mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang kualitas dan kompetensi kerja.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal.

3.3.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah guna pemenuhan kebutuhan penyediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Tertibnya administrasi laporan keuangan SKPD;
- Terciptanya administrasi dalam pengelolaan aset SKPD;
- Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP

3.3.5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi adalah guna pemenuhan kebutuhan penyediaan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset yang handal, visioner, dan inovatif.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Tersedianya dokumen perencanaan SKPD tahun 2015;
- Tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD;

3.3.6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Tujuan pelaksanaan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah guna meningkatkan jumlah penerimaan dan tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Tersusunnya dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Tersedianya LPJ TA 2013;
- Terlaksananya penerbitan SP2D;
- Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD;
- Terselenggaranya pelayanan pengelolaan gaji pegawai;
- Tersusunnya SPD 82 SKPD;
- Terpenuhinya perhitungan PPH Pasal 21;
- Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- Tersedianya barang koasi dan perporasi;
- Tersusunnya laporan keuangan SKPD dan laporan tugas pembantuan SKPD;
- Tersusunnya Perda APBD dan Perda Perubahan APBD, serta Terlaksananya bintek aplikasi penyusunan APBD;
- Tersusunnya dokumen ASB dan SSHB tahun 2015;
- Terlatihnya PPK SKPD dan Bendahara tentang penatausahaan;
- Terselenggaranya verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD;
- Tersusunnya dokumen kebijakan keuangan daerah;
- Tercapainya optimalisasi SKPD dan Stakeholder penerima dana APBD dengan baik;
- Terlaksananya pengelolaan kas daerah dengan baik;
- Tersusunnya laporan PPKD;
- Terselenggaranya Monev Hibah yang efektif serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Tersusunnya dokumen pengantar nota keuangan Raperda APBD dan dokumen nota keuangan Raperda APBD, serta Tersusunnya dokumen

- pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD dan dokumen nota keuangan Raperda Perubahan APBD;
- Tersedianya dokumen pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD yang disusun;
  - Terselenggaranya evaluasi pertanggungjawaban fungsional SKPD;
  - Terselenggaranya supervisi pengakuntansian laporan keuangan SKPD semesteran dan tahunan;
  - Terpenuhinya kesesuaian data pengelolaan penerimaan pada SKPD;
  - Tersusunnya Perbup Penjabaran APBD dan Perbup Penjabaran APBD;
  - Terfasilitasinya rapat-rapat kerja dan rapat rutin TAPD;
  - Tersedianya laporan yang berbasis aplikasi;
  - Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan;
  - Terlaksananya pelayanan PBB-P2 dan BPHTB tahun 2014;
  - Terlaksananya pendataan PBB-P2 TA. 2014;
  - Terlaksananya pengamanan PAD di TA. 2014;
  - Terwujudnya kualitas SDM yang memadai dalam SAPD;
  - Terlaksananya penerbitan SPTPD dan penerbitan SKP daerah;
  - Tersedianya data wajib pajak yang akurat;
  - Tersedianya data progres keuangan dana tugas pembantuan;
  - Terlaksananya pengakuntansian PPKD dan Konsolidator bulanan;
  - Tersusunnya laporan keuangan Pemda sesuai peraturan yang terbaru;

### 3.3.7. Program Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah

Tujuan pelaksanaan program pengelolaan aset dan aparatur daerah adalah terciptanya Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun indikator kinerja program ini adalah :

- Terpeliharanya aset kendaraan dinas Kabupaten Pandeglang;
- Tersusunnya neraca aset kabupaten pandeglang;
- Terlaksananya kegiatan pengamanan dan penertiban aset daerah Kabupaten Pandeglang;

- Tersusunnya laporan daftar pengadaan barang milik daerah tahun 2014;
- Tersedianya laporan kebutuhan barang dan laporan kebutuhan pemeliharaan barang Kabupaten Pandeglang;
- Tersedianya nilai aset tetap bangunan gedung kantor;
- Terlaksananya peningkatan manajemen aset/barang milik daerah;
- Tersedianya buku induk inventaris BMD;
- Terlaksananya sosialisasi BMD;

Berdasarkan tujuan dan indikator kinerja setiap program di atas, pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) Program dan 62 (enam puluh dua) Kegiatan.

Adapun total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang diusulkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 11.213.021.500,-

Rincian usulan pagu indikatif berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada table berikut :

**Tabel 3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014**  
**dan Prakiraan Maju 2015**  
**Kabupaten Pandeglang**

**Nama SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015				Instansi Pusat/ SKPD Provinsi Penanggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
					APBD Kab. (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)			APBD Kab. (Rp)	APBD Prov (Rp)	APBN (Rp)	
1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
<b>1.20</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</b>												
<b>1.00.1.20.06.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Lancarnya kegiatan operasional kantor</b>											
1.00.1.20.06.01.007	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas serta tersedianya makanan dan minuman harian tamu	DPKPA	1 tahun	180,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	189,000,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.00.1.20.06.01.012	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKPA	20 jenis barang	400,128,056	-	-	keg lanjutan	20 jenis barang	420,134,459	-	-	
1.00.1.20.06.01.022	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	Tersedianya kelengkapan administrasi kepegawaian dan kearsipan	DPKPA	1 kegiatan	20,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	21,000,000	-	-	
1.00.1.20.06.01.024	Layanan administrasi kantor	Terlaksananya layanan administrasi kantor	DPKPA	12 bulan	3,400,000,000	-	-	keg lanjutan	12 bulan	3,570,000,000	-	-	
1.00.1.20.06.01.031	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	Terlaksananya pembayaran honorarium TKK Kab. Pandeglang	DPKPA	12 bulan	43,102,444	-	-	keg lanjutan	12 bulan	45,257,566	-	-	
<b>1.00.1.20.06.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representatif</b>											
1.00.1.20.06.02.016	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DPKPA	1 tahun	30,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	31,500,000	-	-	
1.00.1.20.06.02.018	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DPKPA	2 jenis kendaraan	40,000,000	-	-	keg lanjutan	2 jenis kendaraan	42,000,000	-	-	
1.00.1.20.06.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DPKPA	1 tahun	30,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	31,500,000	-	-	
1.00.1.20.06.02.036	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif	DPKPA	1 kegiatan	30,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	31,500,000	-	-	

RENJA Akhir  
DPKPA TAHUN 2014

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.00.1.20.06.02.071	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan LAN	Terpeliharanya jaringan LAN	DPKPA	1 tahun	40,000,000	-	-	keg baru	1 tahun	42,000,000	-	-	
<b>1.00.1.20.06.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas SDM Pengelola keuangan</b>											
1.00.1.20.06.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendelegasian aparatur untuk mengikuti diklat/bintek tentang pengelolaan keuangan	Kabupaten Pandeglang	1 tahun	50,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	52,500,000	-	-	
<b>1.00.1.20.06.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan capaian keuangan</b>											
1.00.1.20.06.06.006	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	Tertibnya administrasi laporan keuangan SKPD	DPKPA	15 dokumen	41,000,000	-	-	keg lanjutan	15 dokumen	43,050,000	-	-	
1.00.1.20.06.06.007	Pengelolaan Aset SKPD	Terciptanya administrasi dalam pengelolaan aset SKPD	DPKPA	1 kegiatan	20,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	21,000,000	-	-	
1.00.1.20.06.06.009	Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP	Terlaksananya analisis/verifikasi pengajuan SPP	DPKPA	1 tahun	40,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	42,000,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
<b>1.00.1.20.06.08</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi</b>											
1.00.1.20.06.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD Tahun 2015	DPKPA	11 dokumen	32,800,000	-	-	keg lanjutan	11 dokumen	34,440,000	-	-	
1.00.1.20.06.08.002	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	DPKPA	15 dokumen	22,500,000	-	-	keg lanjutan	15 dokumen	23,625,000	-	-	
<b>1.20.1.20.06.17</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Tertibnya administrasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah</b>											
1.20.1.20.06.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	DPKPA	15 dokumen	200,000,000	-	-	keg lanjutan	15 dokumen	210,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya LPJ TA. 2013	DPKPA	1 Perbup	100,000,000	-	-	keg lanjutan	1 Perbup	105,000,000	-	-	
		Tersedianya LPJ TA. 2013	DPKPA	2 dokumen					2 dokumen				
1.20.1.20.06.17.021	Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)	Terlaksananya penerbitan SP2D	DPKPA	18.000 ply/ lembar	50,000,000	-	-	keg lanjutan	10000 ply/ lembar	52,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.022	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian	Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD	DPKPA	12 dokumen	130,000,000	-	-	keg lanjutan	12 dokumen	136,500,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.17.024	Pelayanan Pengelolaan Gaji	Terselenggaranya pelayanan pengelolaan gaji pegawai	DPKPA	28 dokumen	15,000,000	-	-	keg lanjutan	28 dokumen	15,750,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.030	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SPD 82 SKPD	DPKPA	82 dokumen	60,000,000	-	-	keg lanjutan	82 dokumen	63,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.037	Asistensi penyusunan SPT/restituasi PPh '21	Terpenuhinya perhitungan PPH Pasal '21	DPKPA	1 dokumen PPH Pasal 21	100,000,000	-	-	keg lanjutan	1 dokumen PPH Pasal 21	105,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.040	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	DPKPA	1 kegiatan	100,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	105,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.052	Pengadaan Barang Kuasi dan Perporasi Bidang Pendapatan	Tersedianya barang kuasi dan perporasi	DPKPA	2 jenis barang	378,300,000	-	-	keg lanjutan	2 jenis barang	397,215,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.053	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD dan laporan tugas pembantuan SKPD	DPKPA	90 laporan	140,000,000	-	-	keg lanjutan	90 laporan	147,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.056	Penyusunan APBD dan perubahan APBD	Tersusunnya Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	DPKPA	2 dokumen	300,000,000	-	-	keg lanjutan	2 dokumen	315,000,000	-	-	
		Terlaksananya bintek aplikasi penyusunan APBD	DPKPA	1 kegiatan									
1.20.1.20.06.17.064	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	Tersusunnya dokumen ASB dan SSHB tahun 2015	DPKPA	2 dokumen	150,000,000	-	-	keg lanjutan	2 dokumen	157,500,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.17.074	Pembinaan Bendahara SKPD	Terlatihnya PPK SKPD dan Bendahara tentang penatausahaan	DPKPA	164 orang	60,000,000	-	-	keg lanjutan	164 orang	63,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.076	Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD	Terselenggaranya verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD	DPKPA	2 kegiatan	200,000,000	-	-	keg lanjutan	2 kegiatan	210,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.078	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD	Tersusunnya dokumen kebijakan keuangan daerah	DPKPA	4 dokumen	75,000,000	-	-	keg lanjutan	4 dokumen	78,750,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.080	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD	Tercapainya optimalisasi SKPD dan Stakeholder penerima dana APBD dengan baik	DPKPA	1 kegiatan	130,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	136,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.081	Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya anggaran kas Pemda dan 82 SKPD	DPKPA	83 dokumen	75,000,000	-	-	keg lanjutan	83 dokumen	78,750,000	-	-	
		Tersusunnya MOU Bank Persepsi	DPKPA	2 Bank Persepsi			2 Bank Persepsi						
		Tersedianya laporan penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan	DPKPA	12 laporan			12 laporan						
		Tersusunnya buku kas pembantu penerimaan dan pengeluaran	DPKPA	24 buku laporan			24 buku laporan						
		Tersusunnya laporan konsolidasi dan Rekon Bank	DPKPA	12 buku laporan			12 buku laporan						
Tersusunnya laporan arus kas	DPKPA	2 laporan			2 laporan								
1.20.1.20.06.17.082	Biaya Operasional Kegiatan PPKD	Tersusunnya laporan PPKD	DPKPA	12 laporan	20,000,000	-	-	keg lanjutan	12 laporan	21,000,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.17.083	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah	Terselenggaranya Monev Hibah yang efektif serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	DPKPA	4 kegiatan	41,000,000	-	-	keg lanjutan	4 kegiatan	43,050,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.085	Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD	Tersusunnya dokumen pengantar nota keuangan Raperda APBD dan dokumen nota keuangan Raperda APBD	DPKPA	2 dokumen	50,000,000	-	-	keg lanjutan	2 dokumen	52,500,000	-	-	
		Tersusunnya dokumen pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD dan dokumen nota keuangan Raperda Perubahan APBD	DPKPA	2 dokumen					2 dokumen				
1.20.1.20.06.17.086	Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Tersedianya dokumen pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD yang disusun	DPKPA	4 dokumen	50,000,000	-	-	keg lanjutan	4 dokumen	52,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.090	Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD	Terselenggaranya evaluasi pertanggungjawaban fungsional SKPD	DPKPA	82 laporan	70,000,000	-	-	keg lanjutan	82 laporan	73,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.091	Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD	Terselenggaranya supervisi pengakuntansian laporan keuangan SKPD semesteran dan tahunan	DPKPA	1 dokumen	50,000,000	-	-	keg lanjutan	1 dokumen	52,500,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.17.094	Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil	Terpenuhinya kesesuaian data pengelolaan penerimaan pada SKPD	DPKPA	1 kegiatan	65,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	68,250,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.097	Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perbup Penjabaran APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	DPKPA	3 dokumen	250,000,000	-	-	keg lanjutan	3 dokumen	262,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.098	Fasilitasi Kegiatan TAPD dan Sekretariat TAPD	Terfasilitasinya rapat-rapat kerja dan rapat rutin TAPD	DPKPA	1 tahun	120,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	126,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.099	Manajemen SIPKD Pemda Kab.Pandeglang	Tersedianya laporan yang berbasis aplikasi	DPKPA	12 dokumen	170,000,000	-	-	keg lanjutan	12 dokumen	178,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.100	Bimbingan Teknis SKPD Penghasil	Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan	DPKPA	1 kegiatan	10,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	10,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.101	Operasional PBB-P2 dan BPHTB	Terlaksananya pelayanan PBB-P2 dan BPHTB tahun 2014	DPKPA	1 kegiatan	1,505,831,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	1,581,122,550	-	-	
1.20.1.20.06.17.102	Pemutahiran data PBB-P2 dan BPHTB	Terlaksananya pendataan PBB-P2 dan BPHTB tahun 2014	DPKPA	1 dokumen	10,000,000	-	-	keg lanjutan	1 dokumen	10,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.103	Pengamanan Penerimaan PAD	Terlaksananya pengamanan PAD di TA 2014	DPKPA	1 kegiatan	200,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	210,000,000	-	-	

RENJA Akhir  
DPKPA TAHUN 2014

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.17.104	Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)	Terwujudnya kualitas SDM yang memadai dalam SAPD	DPKPA	1 kegiatan	143,000,000	-	-	keg baru	1 kegiatan	150,150,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.106	Perhitungan Dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Terlaksananya penerbitan SPTPD Terselenggaranya penerbitan SKP daerah	DPKPA	1000 SPTPD	100,000,000	-	-	keg baru	1000 SPTPD	105,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.107	Pemutahiran dan Pendataan Potensi Wajib Pajak	Tersedianya data wajib pajak yang akurat	DPKPA	1 dokumen wajib pajak	10,000,000	-	-	keg lanjutan	1 dokumen wajib pajak	10,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.108	Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan	Tersedianya data progres keuangan kegiatan dana tugas pembantuan	DPKPA	12 dokumen	85,000,000	-	-	keg baru	12 dokumen	89,250,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.109	Pengakuntansian PPKD dan Pengakuntansian Konsolidator	Terlaksananya pengakuntansian PPKD dan konsolidator bulanan	DPKPA	12 dokumen	80,000,000	-	-	keg baru	12 dokumen	84,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.17.110	Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	Tersusunnya laporan keuangan Pemda sesuai peraturan yang terbaru	DPKPA	2 dokumen	140,000,000	-	-	keg baru	2 dokumen	147,000,000	-	-	
<b>1.20.1.20.06.50</b>	<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Terkelolanya aset daerah dengan baik</b>											
1.20.1.20.06.50.007	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya aset kendaraan dinas Kabupaten Pandeglang	DPKPA	100 unit kendaraan	200,000,000	-	-	keg lanjutan	100 unit kendaraan	210,000,000	-	-	

**RENJA Akhir**  
**DPKPA TAHUN 2014**

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.50.011	Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Tersusunnya neraca aset Kabupaten Pandeglang	DPKPA	1 dokumen	50,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	52,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.50.012	Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan penertiban aset daerah Kab. Pandeglang	DPKPA	1 kegiatan	200,000,000	-	-	keg lanjutan	1 kegiatan	210,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.50.014	Penatausahaan Belanja Modal SKPD	Tersusunnya laporan daftar pengadaan barang milik daerah tahun 2014	DPKPA	80 SKPD	50,000,000	-	-	keg lanjutan	80 SKPD	52,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.50.025	Penyusunan RKBU dan RKPBU	Tersedianya laporan kebutuhan barang dan laporan kebutuhan pemeliharaan barang Kabupaten Pandeglang	DPKPA	2 dokumen	50,000,000	-	-	keg lanjutan	2 dokumen	52,500,000	-	-	
1.20.1.20.06.50.026	Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda	Tersedianya nilai aset tetap bangunan gedung kantor	DPKPA	32 gedung/ bangunan kantor	200,000,000	-	-	keg lanjutan	32 bangunan kantor	210,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.50.028	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset / barang milik daerah	DPKPA	1 kegiatan	120,000,000	-	-	keg lanjutan	1 tahun	126,000,000	-	-	
1.20.1.20.06.50.031	Inventarisir / Sensus Barang Daerah	Tersedianya buku induk inventaris BMD	DPKPA	1 dokumen	275,360,000	-	-	keg lanjutan	1 dokumen	289,128,000	-	-	

RENJA Akhir  
DPKPA TAHUN 2014

1	2	3	4	5	6			7	8	9			10
1.20.1.20.06.50.034	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya sosialisasi BMD	DPKPA	1 kegiatan	80,000,000	-	-	keg baru	1	84,000,000	-	-	
<b>JUMLAH</b>					<b>11,213,021,500</b>					<b>11,773,672,575</b>			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakeholder terkait dengan pengertian bahwa rencana kerja ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam rangka pencapaian tujuan SKPD.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam rencana kerja ini merupakan upaya penggalan berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dengan telah ditetapkannya rencana kerja ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi internal SKPD sehingga menghasilkan persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugasnya.

Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini diharapkan mampu mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di tahun 2014.

Oleh karena itu, komitmen di antara semua jajaran struktural Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang senantiasa dijunjung tinggi dalam melaksanakan rencana kerja secara maksimal agar hasil yang dicapai realistis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan ini diharapkan mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak berbagai faktor yang

sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Mei 2013

KEPALA DINAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET  
KABUPATEN PANDEGLANG

**H. PARDJIJO SUKARTO, SE, MM.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19530609 198211 1 001

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**